

Analisis hasil audit dan tindak lanjut temuan pengawasan inspektorat tahun 2008 sampai dengan tahun 2012: studi kasus Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat = Auditing result and review on inspectorate supervision findings year of 2008 to 2012 case study of coordinating ministry for people welfare / Lucky Kristiawan

Lucky Kristiawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433627&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil audit pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 guna menemukan jenis temuan yang sering muncul, penyebab temuan-temuan tersebut belum ditindaklanjuti, kendala dalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar permasalahan-permasalahan yang ditemukan tidak terulang lagi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian menyarankan agar Kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat sebagai Pemantau Pengendalian Intern, menjalankan fungsi konsultasi dan penjamin kualitas di Kementerian Koordinator bidang Kesra.

ABSTRACT

This research was conducted by analyzing audit result on Coordinating Ministry for People Welfare during the period 2008 to 2012 in order to find the kinds of findings that often show up, the cause of such findings has not benefited upon, a constraint in carrying out follow-up findings the results of supervision and formulate appropriate recommendations so that problems are found not reoccur. The results showed all the problems caused by weak internal control Systems. Results of suggest that the Ministry implement PP 60/2008 about the Internal Control System the Government effectively and enhance the capacity and the role of Inspectorate as internal control monitoring, perform quality assurance, consulting on Coordinating Ministry for People Welfare.